

# Panja atau Pansus? Fraksi Demokrat Pilih Panja

Pontianak. Fraksi Partai Demokrat mengikuti langkah Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalbar. Fraksi Demokrat memilih Panitia Kerja (Panja) untuk menyelesaikan masalah aset dan Provinsi Kapuas Raya (PKR). "Kita mendukung pembentukan Panja PKR dan penertiban aset sesuai dengan sistem akuntansi pemerintahan, dan manajemen pengelolaan aset untuk hasil audit yang lebih baik," kata Ary Pudyanti SE, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalbar, Senin (9/7). Mengenai hasil audit BPK RI yang sudah disampaikan dalam paripurna istimewa pada 5 Juli 2012 itu dapat ditindaklanjuti melalui Panja. Hal itu

sesuai dengan Tatib DPRD Bab XIII pasal 126 ayat (7).

Ary melanjutkan, skala prioritas menjadi pertimbangan Fraksinya. Tindak lanjut LHP sesuai Permen No 13 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.

"Kita diberi waktu 60 hari sesuai pasal 20 ayat (3), action plan penyelesaian 90 hari, kemudian prioritas kedua pembahasan dan tahapan APBD Perubahan 2012 dan tahapan pembahasan APBD 2013," jelas dia.

Ary menambahkan, untuk masalah PKR Fraksi Demokrat mendorong untuk dibahas di komisi A. Sedangkan, masalah aset dibahas secara optimal di Komisi B. "Karena banyak agenda prioritas makanya kita bagi tugas, dan masalah aset dan PKR kami minta untuk mengoptimalkan pembahasannya," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kalbar Minsen SH mengatakan, menurut anggota BPK RI Rizal Djalil saat paripurna, untuk mempercepat penyelesaian masalah aset tidak mesti melalui Pansus. Sesuai Tatib bisa diselesaikan melalui Panitia Kerja (Panja). DPRD Kalbar mendorong penataan aset menjadi lebih baik.

"Perlu dicatat, kalau kita bentuk Pansus akan memakan biaya yang cukup besar. Jika digabungkan biaya konsultasi dan biaya studi banding sudah mendekati Rp 600 juta, atau setengah miliar lebih," ungkapnya.

Menurut legislator PDI Perjuangan ini, jika satu Pansus anggotanya mencapai 23 orang, sekali konsultasi saja sudah makan uang negara sekitar Rp 200-an juta. Belum lagi untuk studi banding. Studi banding di luar daerah Jakarta, bisa memakan biaya perjalanan mencapai Rp 15-an juta per orang.

"Nah, tinggal kita hitung saja per orangnya itu. Kalau dikalikan 23 orang sudah Rp 300 juta lebih.

Ditambah biaya konsultasi tadi itu sudah mendekati Rp 600 juta. Setengah miliar lebih," kata Minsen.

Besarnya anggaran itu menjadi salah satu pertimbangan legislator PDIP ini selaku pimpinan Dewan untuk menolak Pansus Aset. Dalam hal ini, jangan berorientasi pada perjalanan dinas, tapi berorientasi pada penyelesaian masalah.

"Masalah aset ini bisa dicari jalan keluarnya dengan cara yang lain dengan menghemat uang negara. Hal ini juga yang mungkin teman-teman dan orang luar tidak pahami, bahwa biaya Pansus itu luar biasa besarnya," ucap mantan Ketua DPRD Landak ini. (jul)